SALINAN

PEMERINTAH KABUPATEN BATANG HARI

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG HARI

NOMOR 8 TAHUN 2000.

T E N T A N G

TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BATANG HARI,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan lebih lanjut Pasal 22 ayat (1) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan mengenai Desa dipandang perlu segera mengatur Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2755);

2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana diubah Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);

3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);

4. Undang-undang ....

4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);

5. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 70);

6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1999 tentang Pencabutan Beberapa Peraturan Menteri Dalam Negeri, Keputusan Menteri Dalam Negeri mengenai Pelaksanaan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa;

7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Penyesuaian Peristilahan Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan;

8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa.

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG HARI

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Batang Hari.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Batang Hari.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Batang Hari.
4. Desentralisasi adalah Penyerahan Wewenang Pemerintahan oleh Pemerintah Kepada Daerah Otonom dalam kerangka Negara kesatuan Republik indonesia.

5. Tugas .....

5. Tugas Pembantuan adalah dari Pemerintah Kepada Daerah dan Desa, dan dari Daerah ke Desa untuk melaksanakan tugas tertentu yang disertai pembiayaan, sarana dan prasarana serta sumber daya manusia dengan kewajiban melaporkan pelaksanaannya dan mempertanggung jawabkan kepada yang menugaskan.

6. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten dan Daerah kota.

7. Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah Kabupaten.

8. Kawasan Pedesaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama pertanian termasuk pengelolaan sumber daya alam, dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat pemukiman pedesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi.

9. Pemerintahan Desa adalah kegiatan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan Badan Perwakilan Desa.

10. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dan Perangkat Desa

11. Badan Perwakilan Desa (BPD) atau disebut dengan nama lain adalah Badan Perwakilan yang terdiri atas Pemuka-pemuka masyarakat di Desa yang berfungsi mengayomi adat istiadat, membuat Peraturan Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

12. Bakal Calon adalah warga masyarakat Desa sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam Peraturan Daerah ini didasarkan penyaringan oleh Panitia Pemilihan yang terdiri dari para anggota BPD dan Perangkat Desa.

13. Calon adalah calon Kepala Desa yang telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh panitia pemilihan.

14. Calon terpilih adalah calon Kepala Desa yang memperoleh atau yang mendapat dukungan suara terbanyak dalam pemilihan.

15. Pejabat .....

15. Penjabat Kepala Desa adalah seseorang yang diangkat dengan Keputusan Bupati atau usulan BPD dari Perangkat Desa yang memenuhi persyaratan selama 1 tahun.

16. Pemilih adalah penduduk yang bersangkutan dan telah memenuhi persyaratan untuk mempergunakan hak pilihnya.

17. Penjaringan adalah suatu upaya yang dilakukan oleh panitia pemilih untuk mendapatkan bakal calon dari warga masyarakat setempat.

18. Penyaringan adalah seleksi yang dilakukan baik dari segi administrasi maupun kemampuan dan kepemimpinan dari bakal calon.

19. Kampanye adalah suatu media yang digunakan untuk menaruh simpati pemilih yang dilakukan oleh calon yang berhak dipilih berupa penyampaian program yang akan dilaksanakan apabila yang bersangkutan terpilih menjadi Kepala Desa.

20. Desa Transmigrasi adalah suatu wilayah pemukiman yang ditempati sejumlah transmigran sebagai kesatuan masyarakat termasuk didalamnya masyarakat hukum yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah yang masih dalam pembinaan Menteri Negara Transmigrasi dan PPH serta Departemen Dalam Negeri.

21. Unit-unit Pemukiman adalah suatu wilayah dan dengan sejumlah penduduk transmigran sekurang-kurangnya 300 KK dan luas wilayah lebih kurang 2.500 Ha yang dikelola oleh Menteri Negara Transmigrasi dan PPH untuk dikembangkan menjadi Desa baru.

BAB II

HAK MEMILIH DAN DIPILIH

Pasal 2

Yang dapat memilih Kepala Desa adalah penduduk Desa Warga Negara Republik Indonesia yang :

a. Terdaftar sebagai penduduk Desa yang bersangkutan secara syah sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan dengan tidak terputus-putus.

b. Sudah mencapai usia 17 (tujuh belas) Tahun atau telah pernah kawin.

c. Tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan Keputusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

d. Tidak .....

d. Tidak pernah terlibat baik langsung maupun tidak langsung dalam sesuatu kegiatan yang mengkhianati Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945.

Pasal 3

(1) Yang dapat dipilih menjadi Kepala Desa adalah penduduk Desa Warga Negara Republik Indonesia dengan syarat-syarat :

a. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.

b. Setia dan taat kepada Pancasila dan UUD 1945, Negara dan Pemerintah Republik Indonesia.

c. Tidak pernah terlibat langsung atau tidak langsung dalam kegiatan yang mengkhianati Pancasila dan UUD 1945, G. 30 S / PKI dan atau kegiatan organisasi terlarang lainnya.

d. Berpendidikan sekurang-kurangnya Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP), khusus untuk Desa yang berada di wilayah Ibukota Kabupaten dan Pusat Pemerintahan Kecamatan sekurang-kurangnya berpendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA).

e. Umur sekurang-kurangnya 25 (dua puluh lima) Tahun setinggi-tingginya 55 (lima puluh lima) Tahun.

f. Sehat jasmani dan rohani.

g. Nyata-nyata tidak terganggu kesehatannya.

h. Berkelakuan baik, jujur dan adil.

i. Tidak pernah dihukum penjara karena melakukan tindak pidana.

j. Tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

k. Mengenal Daerahnya dan dikenal oleh masyarakat di Desa setempat.

l. Bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa.

m. Terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal tetap di Desa yang bersangkutan sekurang-kurangnya 3 (tiga) Tahun terakhir dengan tidak pernah terputus-putus kecuali bagi putra desa yang berada diluar desa yang bersangkutan.

n. Memahami dan menguasai adat istiadat yang berlaku di desa tersebut.

(2) Pegawai .....

(2) Pegawai Negeri yang mencalonkan diri sebagai Kepala Desa selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) juga harus memiliki surat keterangan persetujuan dari atasan yang berwenang sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.

(3) Bagi Pegawai Negeri dan putra desa yang terpilih dan diangkat menjadi Kepala Desa, terhitung mulai tanggal pelantikan sebagai Kepala Desa harus bertempat tinggal di Desa yang bersangkutan.

(4) Pegawai Negeri Sipil yang dipilih / diangkat sebagai Kepala Desa dibebaskan sementara waktu dari jabatan organiknya selama menjadi Kepala Desa tanpa kehilangan statusnya sebagai Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 4

(1) Dalam pemilihan Kepala Desa, setiap penduduk desa yang telah ditetapkan sebagai pemilih dan calon yang berhak dipilih dalam pemilihan Kepala Desa wajib hadir dan tidak boleh diwakilkan kepada siapapun dan dengan alasan apapun.

(2) Bagi Calon Kepala Desa yang berhak dipilih, tidak hadir dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa tanpa alasan yang jelas dinyatakan gugur oleh Panitia Pemilihan.

BAB III

PENANGGUNG JAWAB PEMILIHAN DAN PANITIA PEMILIH

Bagian Pertama

Penanggung Jawab Pemilihan

Pasal 5

(1) Penanggung Jawab Pemilihan Kepala Desa adalah BPD.

(2) BPD menetapkan panitia pemilihan dengan surat keputusan BPD.

(3) Untuk pencalonan dan pemilihan Kepala Desa, BPD membentuk panitia pemilihan yang terdiri dari 4 (empat) orang Anggota BPD dan 4 (empat) orang Perangkat Desa.

(4) Panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melakukan pemeriksaan identitas bakal calon berdasarkan persyaratan yang ditentukan, melakukan pemungutan suara dan melaporkan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa kepada BPD.

Bagian .....

Bagian Kedua

Panitia Pemilihan

Pasal 6

(1) Panitia pemilihan sebagaimana dimaksud Pasal 6 keanggotaan terdiri dari :

a. Wakil Ketua BPD sebagai Ketua merangkap Anggota.

b. Sekretaris BPD sebagai Sekretaris.

c. 2 (dua) orang Anggota BPD sebagai Anggota.

d. Sekretaris Desa sebagai Anggota.

e. Kaur Pemerintahan sebagai Anggota.

f. 2 (dua) orang Kepala Dusun sebagai Anggota.

(2) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas mempunyai tugas :

a. Melaksanakan penjaringan dan penyaringan bakal calon Kepala Desa berdasarkan petunjuk BPD.

b. Menerima pendaftaran bakal calon dan persyaratan.

c. Melaksanakan pendaftaran pemilih.

d. Melaksanakan pemilihan calon Kepala Desa yang berhak dipilih.

e. Menyusun dan mengajukan rencana biaya pemilihan.

f. Membuat berita acara pemilihan.

Pasal 7

Apabila diantara anggota Panitia pemilihan ada yang ditetapkan sebagai bakal calon atau calon atau berhalangan, keanggotaannya digantikan oleh anggota BPD atau unsur kepala urusan atau unsur kepala dusun yang lain berdasarkan keputusan ketua panitia pemilihan.

Pasal 8

(1) Bakal calon yang telah memenuhi persyaratan, oleh panitia diajukan kepada kepada BPD untuk ditetapkan sebagai calon yang berhak dipilih.

(2) BPD dalam menetapkan calon Kepala Desa yang berhak dipilih dapat memanggil bakal calon untuk menyampaikan program yang akan dilaksanakan apabila yang bersangkutan terpilih sebagai Kepala Desa.

(3) Calon .....

(3) Calon Kepala Desa yang berhak dipilih dapat mengkampanyekan program sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada masyarakat yang pelaksanaanya diatur oleh panitia pemilihan.

Pasal 9

(1) Tujuh hari sebelum pemungutan suara dilaksanakan, panitia pemilihan memberitahukan kepada masyarakat tentang akan diadakannya pemilihan Kepala Desa dan mengumumkan secara terbuka nama-nama calon yang berhak dipilih dan daftar pemilih yang sudah disahkan oleh panitia pemilihan.

(2) Pemilihan harus bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.

(3) Setiap warga desa yang mempunyai hak pilih hanya mempunyai satu suara dan tidak boleh diwakilkan.

(4) Pemungutan suara dilaksanakan pada hari, tanggal dan tempat yang telah ditentukan oleh panitia pemilihan.

(5) Pada saat pemungutan suara dilaksanakan para calon Kepala Desa yang berhak dipilih harus berada ditempat pemungutan suara (TPS).

Pasal 10

(1) Pemilihan calon Kepala Desa dilaksanakan dengan mencoblos surat suara yang memuat tanda gambar calon yang dihadiri sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah pemilih yang telah disahkan oleh panitia pemilihan.

(2) Apabila pada saat berakhirnya pemungutan suara yang telah diundurkan 3 jam juga belum tercapai quorum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum tercapai, perhitungan suara, dapat diundurkan paling lama 3 jam dengan ketentuan quorum ditentukan 1/2 dari jumlah pemilih yang telah disahkan oleh panitia pemilihan dan dimuat dalam Berita Acara Pemilihan.

(3) Apabila pada saat berakhirnya pemungutan suara yang telah diundurkan 3 jam juga belum tercapai quorum 1/2 dari jumlah pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) maka pemilihan ditunda paling lambat 3 hari setelah pemungutan suara dilakukan.

Pasal 11

(1) Calon Kepala Desa yang dinyatakan terpilih adalah calon yang mendapatkan dukungan suara terbanyak.

(2) Calon .....

(2) Calon Kepala Desa terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan BPD berdasarkan laporan dan Berita Acara Pemilihan dari panitia pemilihan dan disahkan oleh Bupati dengan menerbitkan Keputusan Bupati tentang pengesahan calon Kepala Desa terpilih.

Pasal 12

(1) Apabila calon terpilih yang mendapatkan dukungan suara terbanyak sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 11 lebih dari 1 (satu) orang dengan jumlah yang sama maka untuk menentukan calon yang berhak menjadi Kepala Desa diadakan pemilihan ulang.

(2) Pemilihan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan hanya untuk calon-calon yang mendapatkan suara yang sama , selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak penandatangan Berita Acara Pemilihan.

(3) Dalam hal pemilihan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hasilnya tetap sama, maka untuk menentukan calon terpilih keputusannya diserahkan kepada Keputusan BPD.

Pasal 13

(1) BPD memberitahukan kepada Kepala Desa mengenai akan berakhirnya masa jabatan, Kepala Desa secara tertulis 6 (enam) bulan sebelum berakhir masa jabatan.

(2) Tiga bulan sebelum berakhir masa jabatan Kepala Desa menyampaikan pertanggung jawaban akhir masa jabatan kepada BPD.

(3) Selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan Kepala Desa, BPD segera memproses pemilihan Kepala Desa yang baru.

Pasal 14

BPD segera membentuk Panitia pemilihan Kepala Desa dengan mengacu kepada Pasal 5 dan 6 Peraturan Daerah ini dan berkonsultasi dengan perangkat Pemerintah Desa serta Bupati Batang Hari sesuai hirarchi yang berlaku.

Pasal 15

(1) BPD menugaskan panitia pemilihan untuk melakukan penjaringan dan penyaringan bakal calon.

(2) Tata .....

(2) Tata cara penyaringan dan teknik pelaksanaan penyaringan ditentukan oleh BPD.

(3) Penjaringan dan penyaringan bakal calon didasarkan pada ketentuan jumlah bakal calon sedikit-dikitnya 2 (dua) orang dan sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang bakal calon yang ditetapkan dengan Berita Acara penyaringan bakal calon oleh BPD.

Pasal 16

(1) Bakal calon hasil penyaringan sebagaimana dimaksud Pasal 15 bersama-sama dengan kelengkapan administrasi persyaratannya disampaikan oleh ketua panitia pemilihan kepada BPD.

(2) BPD setelah menerima laporan dari ketua panitia pemilihan menetapkan calon yang dituangkan dalam Berita Acara penetapan calon.

(3) Berita Acara penetapan calon dilampiri dengan :

a. Surat Pernyataan kesediaan menjadi calon.

b. Surat Pernyataan Bertaqwa kepada Tuhan Yang Yang Maha Esa.

c. Surat Pernyataan Setia dan Taat kepada Pancasila dan UUD 1945, Negara dan Pemerintah Republik Indonesia.

d. Surat Pernyataan tidak pernah terlibat baik langsung dalam setiap kegiatan yang mengkhianati Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

e. Bakal calon Kepala Desa yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil harus mendapat izin tertulis dari atasannya yang berwenang .

f. Surat keterangan tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan Keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

g. Surat Keterangan Sehat dari Dokter Pemerintah.

h. Surat Keterangan Berkelakuan Baik dari Kepolisian.

i. Daftar Riwayat Hidup.

j. Salinan Ijazah Pendidikan Terakhir yang telah dilegalisir oleh Pejabat yang mempunyai kewenangan untuk itu.

k. Akte .....

k. Akte Kelahiran / Surat Kenal Lahir dari Pejabat yang berwenang mengeluarkan.

l. Pas photo (hitam putih) ukuran 4 x 6 cm sebanyak 4 (empat) lembar.

Pasal 17

(1) BPD setelah menerima Berita Acara Penetapan calon dan setelah melalui ujian saringan, menetapkan nama-nama calon yang berhak dipilih berdasarkan urutan abjad sedikit-dikitnya 2 (dua) orang.

(2) Nama-nama calon yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud ayat (1) disampaikan kepada ketua panitia pemilihan.

(3) Ketua panitia pemilihan setelah menerima persetujuan calon yang berhak dipilih, menetapkan waktu pelaksanaan pemilihan calon Kepala Desa dan menetapkan tanda gambar setiap calon.

Pasal 18

(1) Calon yang telah ditetapkan oleh panitia pemilihan tidak dibenarkan mengundurkan diri, apabila yang bersangkutan mengundurkan diri, secara administratif dianggap tidak mengundurkan diri.

(2) Apabila calon yang telah ditetapkan oleh panitia pemilihan mengundurkan diri sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini dalam pemilihan ternyata memperoleh suara terbanyak, perolehan suara tersebut dinyatakan batal.

(3) Atas pembatalan perolehan suara sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini, calon yang mendapat dukungan suara terbanyak kedua dinyatakan sebagai calon terpilih.

(4) Ketentuan sebagaimana yang dimaksud pasal 18 berlaku untuk calon yang lebih dari 2 (dua) orang, (dalam arti jika terjadi pengunduran diri salah satu calon tidak menimbulkan calon tunggal) dan bila terjadi pengunduran diantara calon yang menimbulkan calon tunggal, maka pemilihan ditunda sesuai dengan waktu yang ditetapkan oleh Panitia Pemilihan.

Pasal 19

(1) Kampanye dapat dilaksanakan oleh calon yang berhak dipilih paling lambat 7 (tujuh) hari, dan sesudahnya selama 7 (tujuh) hari merupakan masa tenang sebelum pemilihan dilaksanakan.

(2) Kampanye .....

(2) Kampanye harus dilaksanakan secara terkendali, aman, tentram dan tertib.

(3) Kampanye sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) Pasal ini, tidak dibenarkan dalam bentuk :

a. Pawai atau arak-arakan.

b. Pemberian uang, barang dan fasilitas lain.

c. Pemasangan foto, tanda gambar, slogan-slogan dan lain-lain, diluar radius 100 m dari Rumah calon yang berhak dipilih.

(4) Pelaksanaan Kampanye oleh masing-masing calon, Tata cara pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Keputusan BPD.

BAB IV

PEMILIHAN CALON YANG BERHAK DIPILIH

Pasal 20

(1) Pemilihan calon yang berhak dipilih dilaksanakan setelah panitia menerima persetujuan calon yang berhak dipilih dari BPD.

(2) Pemilihan calon sebagaimana dimaksud ayat (1) dihadiri oleh panitia pemilihan dan oleh calon yang berhak dipilih.

Pasal 21

(1) Pemilihan calon yang berhak dipilih dilaksanakan dalam rapat pemilihan calon Kepala Desa yang dipimpin oleh ketua panitia pemilihan dengan dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah seluruh pemilih yang telah disyahkan oleh ketua penitia pemilihan.

(2) Apabila pada pembukaan rapat pemilihan calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud ayat (1), jumlah pemilih belum mencapai qorum. Pimpinan rapat mengundurkan rapat paling lama 3 jam dengan ketentuan qourum 1/2 dari jumlah pemilih.

(3) Apabila sampai batas waktu pengunduran sebagaimana dimaksud ayat (2) dan (3) qourum belum juga tercapai, pelaksanaan rapat pemilihan calon Kepala Desa diundurkan oleh pimpinan rapat selambat-lambatnya dalam waktu 10 (sepuluh) hari, dengan qourum 1/2 jumlah pemilih.

(4) Pengunduran .....

(2) Bentuk dan model surat suara sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b, sebagaimana tersebut pada lampiran Peraturan Daerah ini.

(3) Tanda gambar sebagaimana dimaksud ayat (1), huruf b Pasal ini tidak boleh menggunakan tanda gambar organisasi peserta pemilu dan bukan tanda gambar warna.

BAB V

PELAKSANAAN PEMUNGUTAN SUARA

Pasal 25

(1) Sebelum melaksanakan pemungutan suara, panitia pemilihan membuka kotak suara dan memperlihatkannya kapada para pemilih bahwa kotak suara dalam keadaan kosong serta menutupnya kembali, mengunci dan menyegel dengan menggunakan kertas yang dibubuhi cap atau setempel panitia pemilihan.

(2) Selama pelaksanaan pemungutan suara berlangsung, anak kunci dipegang oleh ketua panitia pemilihan.

Pasal 26

(1) Pemilih yang hadir diberikan selembar surat suara oleh panitia pemilihan melalui pemanggilan berdasarkan urutan daftar hadir.

(2) Sebelum pemilih diberikan surat suara, harus menunjukkan KTP atau identitas lain kepada panitia pemilih untuk dicocokan dengan surat panggilan.

(3) Setelah menerima surat suara, pemilih memeriksa atau meneliti dan apabila surat suara dimaksud dalam keadaan cacat atau rusak, pemilih berhak meminta surat suara baru setelah menyerahkan kembali surat suara yang cacat atau yang rusak kepada panitia teknis.

Pasal 27

(1) Pencoblosan surat suara dilaksanakan dalam bilik suara dengan menggunakan alat yang telah disediakan oleh panitia pemilih.

(2) Pemilih yang masuk kedalam bilik suara adalah pemilih yang telah menggunakan hak pilihnya.

(3) Pemilih yang keliru mencoblos surat suara, dapat meminta surat suara baru setelah menyerahkan surat suara yang keliru kepada panitia pemilih.

(4) setelah .....

(4) Setelah surat suara dicoblos, pemilih memasukkan surat suara kedalam kotak suara dalam keadaan terlipat.

(5) Kotak suara ditempatkan diluar bilik suara dalam lingkungan tempat pemungutan suara (TPS).

Pasal 28

(1) Pada saat pemungutan suara dilaksanakan, panitia pemilihan berkewajiban untuk :

a. Menjamin agar tata demokrasi berjalan dengan lancar, tertib, aman dan teratur.

b. Menjamin pelaksanaan pemungutan suara dengan tertib dan teratur.

(2) Pada saat pemungutan suara dilaksanakan, para calon yang berhak dipilih harus berada ditempat yang telah ditentukan untuk mengikuti pelaksanaan pemungutan suara.

(3) Panitia pemilihan menjaga agar setiap orang yang berhak memilih hanya memberikan satu suara dan menolak pemberian suara yang diwakilkan dengan alasan apapun.

Pasal 29

Panitia pemilihan menentukan batas waktu pelaksanaan pemungutan suara dengan tidak menutup kemungkinan kesepakatan calon yang berhak dipilih untuk mengakhiri pemungutan suara sebelum waktu yang ditentukan atau melebih batas waktu yang ditentukan.

Pasal 30

Jumlah tempat pemungutan suara disesuaikan dengan jumlah mata pilih, luas wilayah dan jarak jangkau oleh pemilih.

BAB VI

PELAKSANAAN PERHITUNGAN SUARA

Pasal 31

(1) Setelah pemilih menggunakan hak pilihnya untuk memberikan suaranya. Panitia pemilih meminta kepada masing-masing calon yang berhak dipilih agar menugaskan 1 orang pemilih untuk menjadi saksi dalam perhitungan suara.

(2) perhitungan .....

(2) Perhitungan suara tetap berjalan terus pemilihan dianggap sah.

Pasal 32

(1) Panitia pemilihan membuka kotak suara yang masuk, dengan disaksikan oleh calon dan pemilih yang hadir.

(2) Setiap lembar surat suara yang diberikan kepada calon yang berhak dipilih dan kemudian panitia membaca nama calon yang berhak dipilih yang mendapat suara tersebut serta mencatatnya dipapan tulis di tempat terbuka, sehingga dapat dilihat dengan jelas oleh semua pemilih yang hadir.

Pasal 33

(1) Surat suara dianggap tidak sah apabila :

a. Tidak memakai surat suara yang telah ditentukan.

b. Tidak terdapat tanda tangan ketua panitia pemilihan pada surat suara.

c. Ditanda tangani atau membuat tanda yang menunjukkan identitas pemilih.

d. Memberikan suara untuk lebih dari satu calon yang berhak dipilih.

e. Menentukan calon lain selain dari calon yang berhak dipilih yang telah ditentukan.

f. Mencoblos diluar garis lingkaran tanda gambar yang disediakan.

(2) Alasan-alasan yang menyebabkan surat suara tidak sah, diumumkan kepada pemilih pada saat itu juga.

(3) Dalam hal terjadi perbedaan pendapat mengenai sah atau tidak sahnya surat suara, antara panitia pemilih dengan calon atau saksi maka ketua panitia pemilihan berkewajiban untuk menentukan dan bersifat mengikat.

Pasal 34

(1) Calon yang berhak dipilih yang memperoleh suara terbanyak sekurang-kurangnya 1/5 dari jumlah pemilih yang menggunakan hak pilihnya dinyatakan sebagai calon terpilih.

(2) Apabila calon yang berhak dipilih tidak seorangpun mendapat dukungan suara terbanyak sebagaimana dimaksud ayat (1) panitia pemilihan mengadakan pemilihan ulang.

(3) Apabila .....

(3) Apabila setelah pemilihan ulang sebagaimana dimaksud ayat (2) hasilnya tetap sama, maka BPD menunjuk pejabat Kepala Desa.

BAB VII

PENETAPAN CALON TERPILIH

Pasal 35

(1) Setelah perhitungan suara selesai, panitia pemilihan menyusun, menandatangani dan membacakan Berita Acara Pemilihan dan menyerahkan kepada ketua panitia pemilihan.

(2) Berita acara pemilihan sebagaimana dimaksud ayat (1) ditandatangani oleh ketua panitia pemilihan pada saat itu juga.

(3) Apabila ketua pemilihan berhalangan, dapat didelegasikan kepada sekretaris atau anggota panitia pemilihan.

(4) Ketua panitia sebelum mengumumkan calon terpilih memberikan kesempatan kepada ketua BPD untuk memberikan penilaian pelaksanaan pemilihan.

(5) Ketua panitia pemilihan mengumumkan hasil pemilihan calon yang berhak dipilih dan menyatakan sahnya pemilihan calon terpilih.

Pasal 36

(1) Apabila lebih dari 1 (satu) orang calon yang berhak dipilih mendapat jumlah dukungan suara terbanyak sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) dengan jumlah yang sama, maka diadakan pemilihan ulang dengan perolehan jumlah dukungan suara terbanyak yang sama.

(2) Pemilihan ulang sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak penandatanganan berita acara pemilihan.

(3) Dalam hal pemilihan ulang sebagaimana dimaksud ayat (2) hasilnya tetap sama, maka untuk menetapkan calon yang dinyatakan terpilih dan diangkat sebagai Kepala Desa menjadi hak BPD.

Pasal 37 .....

Pasal 41

Pada upacara pengucapan sumpah/janji dan pelantikan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada pasal 40, Kepala Desa yang akan dilantik berpakaian Dinas upacara berwarna putih.

Pasal 42

(1) Pelantikan dan pengucapan sumpah/janji Kepala Desa dilaksanakan tepat pada akhir masa Jabatan Kepala Desa yang bersangkutan dan ditetapkan sebagai tanggal pelantikan.

(2) Apabila pelaksanaan pelantikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), jatuh pada pada hari libur maka pelantikan dilaksanakan pada hari kerja berikutnya atau sehari sebelum libur.

(3) Pelantikan Kepala Desa yang tidak dapat dilaksanakan tepat pada waktu karena alasan-alasan yang dapat dipertanggung jawabkan dapat ditunda selama-lamanya 1 (satu) bulan sejak tanggal berakhirnya masa jabatan Kepala Desa dengan ketentuan Kepala Desa yang bersangkutan tetap melaksanakan tugas .

Pasal 43

(1) Kepala Desa diangkat untuk masa jabatan 5 (lima) tahun terhitung mulai tanggal pelantikannya.

(2) Kepala Desa yang berprestasi mempunyai kondite baik dan memenuhi persyaratan dapat dicalonkan untuk dipilih kembali pada masa jabatan berikutnya.

(3) Apabila masa jabatan kedua telah berakhir, yang bersangkutan tidak boleh dicalonkan kembali untuk masa jabatan ketigakalinya di desa yang bersangkutan.

BAB IX

TUGAS KEWAJIBAN DAN LARANGAN BAGI KEPALA DESA

Pasal 44

(1) Tugas dan kewajiban Kepala Desa adalah ;

a. Memimpin .....

a. Memimpin penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa.

b. Membina kehidupan masyarakat desa.

c. Membina perekonomian desa.

d. Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat desa.

e. Mendamaikan perselisihan masyarakat di desa.

f. Mewakili desanya di dalam dan di luar Pengadilan dan dapat menunjukkan kuasa hukumnya.

g. Mengajukan rencana Peraturan Desa bersama dengan BPD.

(2) Penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a termasuk juga pelaksanaan pendaftaran penduduk untuk kepentingan nasional dan melaporkannya kepada pemerintah melalui Bupati Batang Hari dengan tembusan Camat.

(3) Untuk mendamaikan perselisihan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf e Kepala Desa dapat dibantu oleh Lembaga Adat Desa.

(4) Segala perselisihan yang telah didamaikan oleh Kepala Desa bersifat mengikat pihak-pihak yang berselisih.

Pasal 45

(1) Dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam pasal 44 Kepala Desa wajib bersikap dan bertindak adil, tidak diskriminatif serta tidak mempersulit dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

(2) Kepala Desa yang bersikap dan bertindak tidak adil, diskriminatif dan mempersulit dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dapat diberhentikan dari jabatannya setelah melalui teguran tertulis tiga kali berturut-turut oleh BPD.

Pasal 46

(1) Kepala Desa memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama BPD.

(2) Dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya Kepala Desa bertanggung jawab kepada rakyat melalui BPD dan menyampaikan laporan mengenai pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Batang Hari dengan tembusan kepada Camat.

(3) Pertanggungjawaban .....

b. Sebagai tertuduh melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan hukuman mati.

(3) Tindakan penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan kepada Bupati selambat-lambatnya dua kali dua puluh empat jam.

Pasal 49

(1) Kepala Desa yang tertuduh atau tersangka dalam suatu tindak pidana atas usul BPD dapat diberhentikan sementara dan ditetapkan dengan keputusan Bupati Batang Hari.

(2) Selama Kepala Desa dikenakan pemberhentian sementara, maka pekerjaan sehari-hari dilakukan oleh seorang pejabat kepala Desa yang diangkat oleh Bupati atas usul BPD dari perangkat desa yang ada.

(3) Apabila berdasarkan putusan pengadilan tingkat pertama dinyatakan bahwa Kepala Desa yang bersangkutan tidak terbukti melakukan perbuatan yang dituduhkan, maka BPD mengusulkan untuk mencabut Keputusan Bupati tentang pemberhentian sementara.

(4) Apabila berdasarkan putusan pengadilan tingkat pertama, terbukti melakukan perbuatan yang dituduhkan sedangkan Kepala Desa yang bersangkutan melakukan upaya banding, maka selambat-lambatnya 1 (satu) tahun sejak putusan pengadilan tingkat pertama upaya banding dimaksud belum selesai, BPD mengusulkan kepada Bupati Batang Hari agar Kepala Desa yang bersangkutan diberhentikan.

Pasal 50

(1) Kepala Desa yang melalaikan tugasnya, sehingga merugikan masyarakat Desa, Daerah dan Negara dikenakan sanksi administratif berupa teguran atau pemberhentian sementara.

(2) Kepala Desa yang nyata-nyata melakukan perbuatan melawan hukum atau norma-norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat, maka Kepala Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada pasal 47 ayat (2) Peraturan Daerah ini.

Pasal 51 .....

Pasal 51

(1) Bagi Kepala Desa yang tidak dapat menjalankan tugas, wewenang dan kewajiban karena sakit atau mengalami kecelakaan dalam menjalankan tugasnya sampai dengan 6 (enam) bulan berturut-turut, maka salah seorang perangkat desa ditunjuk oleh BPD untuk menjalankan tugas wewenang dan kewajiban sebagai Kepala Desa.

(2) Apabila setelah 6 (enam) bulan berdasarkan keterangan Dokter Pemerintah bahwa Kepala Desa dimaksud belum dapat menjalankan tugas, wewenang dan kewajibannya, maka atas usul BPD, Bupati Batang Hari memberhentikan yang bersangkutan dari jabatannya dan menetapkan penjabat Kepala Desa.

Pasal 52

(1) BPD memberitahukan Kepala Desa mengenai akan berakhirnya masa jabatan Kepala Desa secara tertulis selama 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan.

(2) Tiga bulan sebelum berakhir masa jabatan, Kepala Desa menyampaikan pertanggungjawaban akhir masa jabatan kepada BPD.

(3) Selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sebelum berakhir masa jabatan, BPD segera memperoses pemilihan Kepala Desa yang baru.

Pasal 53

(1) Pertanggungjawaban Kepala Desa yang ditolak oleh BPD termasuk pertanggungjawaban keuangan, harus dilengkapi atau disempurnakan dan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) minggu disampaikan kembali kepada BPD.

(2) Dalam hal pertanggungjawaban Kepala Desa yang telah dilengkapi atau disempurnakan ditolak untuk kedua kalinya, BPD dapat mengusulkan pemberhentian Kepala Desa kepada Bupati Batang Hari.

Pasal 54

Kepala Desa diberhentikan oleh Bupati Batang Hari atas usul BPD karena :

a. Meninggal dunia.
b. Mengajukan permintaan sendiri.

c. Tidak .....

c. Tidak lagi memenuhi syarat dan atau melanggar sumpah / janji.

d. Berakhir masa jabatan dan telah dilantik Kepala Desa yang baru.

e. Melakukan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan atau norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat desa.

f. Ditolak pertanggung jawabannya oleh BPD.

Pasal 55

(1) Apabila penyelenggaraan pencalonan dan pemilihan Kepala Desa tidak dapat dilaksanakan tepat waktu, BPD atas persetujuan Bupati Batang Hari dapat memperpanjang waktu selama-lamanya 1 (satu) bulan dengan ketentuan Kepala Desa yang bersangkutan tetap melaksanakan tugas.

(2) Apabila perpanjangan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum cukup, BPD mengusulkan calon Penjabat Kepala Desa kepada Bupati Batang Hari dari perangkat Desa.

Pasal 56

(1) Pengangkatan penjabat Kepala Desa ditetapkan dengan Keputusan Bupati Batang Hari atas usul BPD dari perangkat desa yang memenuhi persyaratan.

(2) Masa jabatan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama-lamanya 1 (satu) tahun terhitung mulai tanggal pelantikan.

(3) Tugas, wewenang dan kewajiban Kepala Desa yang diangkat adalah sama dengan tugas, wewenang dan kewajiban Kepala Desa.

Pasal 57

Kepala Desa dari Pegawai Negeri yang belum berakhir masa jabatannya tidak dapat diberhentikan dengan alasan sudah pensiun sebagai Pegawai Negeri.

Pasal 58

Kepala Desa dari Pegawai Negeri yang belum berakhir masa jabatannya, tidak dapat dicalonkan :

a. Dalam jabatan struktural atau fungsional, atau terlebih dahulu mendapat izin/persetujuan dari pejabat yang berwenang.

b. Sebagai .....

b. Sebagai Kepala Desa di desa lain.

Pasal 59

(1) Pegawai Negeri yang dipilih/diangkat menjadi Kepala Desa dibebaskan untuk sementara waktu dari jabatan organik selama menjadi Kepala Desa tanpa kehilangan statusnya sebagai Pegawai Negeri.

(2) Gaji dan penghasilan lainnya yang berhak diterima Pegawai Negeri yang diangkat menjadi Kepala Desa tetap dibayar oleh Instansi induknya dan tetap menerima hak-haknya sebagai Kepala Desa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(3) Pegawai Negeri yang dipilih / diangkat menjadi Kepala Desa dapat dinaikkan pangkatnya dan diberikan kenaikkan gaji berkala sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 60

(1) Terhadap kepala Desa yang akan habis masa jabatannya dilakukan evaluasi akhir masa jabatan oleh tim yang dibentuk oleh BPD setelah berkonsultasi dengan Bupati Batang Hari.

(2) Evaluasi sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sebelum berakhir masa jabatan yang bersangkutan.

BAB XI

PENGANGKATAN PENJABAT KEPALA DESA

Pasal 61

(1) Pengangkatan Penjabat Kepala Desa ditetapkan dengan Keputusan Bupati Batang Hari.

(2) Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah Sekretaris Desa yang bersangkutan atau perangkat desa lain yang ditunjuk oleh BPD dan pengangkatannya ditetapkan dengan Keputusan Bupati Batang Hari.

(3) Penjabat Kepala Desa diambil sumpah/janji dan dilantik oleh Bupati Batang Hari atau ditugaskan kepada pejabat yang ditunjuk.

BAB XII
BIAYA PEMILIHAN KEPALA DESA
Pasal 62

(1) Besarnya biaya pemilihan Kepala Desa ditentukan oleh BPD atas usul panitia pemilihan.

(2) Biaya pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

(3) Pembebanan biaya pemilihan kepada para calon Kepala Desa tidak dibenarkan.

BAB XIII
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 63

(1) Apabila penyelenggaraan pencalonan sampai dengan pengangkatan Kepala Desa tidak dapat dilaksanakan tepat waktu, pejabat yang berwenang dapat memperpanjang waktunya untuk selama-lamanya 3 (tiga) bulan, kepada Kepala Desa yang lama untuk tetap melaksanakan tugas sampai dilantiknya Kepala Desa hasil pemilihan.

(2) Apabila perpanjangan waktu sebagaimana dimaksud ayat (1) ternyata belum cukup, maka pejabat yang berwenang menetapkan Penjabat Kepala Desa.

(3) Biaya pemilihan dibebankan kepada bantuan dari APBD Batang Hari dan APPKD desa yang bersangkutan, dan diupayakan sehemat mungkin.

(4) Anggota panitia pemilihan Kepala Desa dan atau siapapun juga yang terbukti melakukan pelanggaran terhadap ketentuan yang berlaku dalam pemilihan Kepala Desa untuk kepentingan pribadi atau golongan, dikenakan tindakan dan sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

(5) Apabila ditemukan penyimpangan jumlah suara hasil pemilihan, yang sengaja atau tidak sengaja dilakukan oleh panitia pemilihan atau siapapun juga, maka proses penyelesaian diatur dalam Tata Tertib Pemilihan.

(6) Panitia .....

(6) Panitia pemilihan serta siapapun juga yang terbukti melakukan penyimpangan sebagaimana dimaksud ayat (5) di atas di tindak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XIV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 64

(1) Ketentuan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini menjadi pedoman bagi Pemerintahan Desa untuk melakukan pencalonan, pemilihan, pelantikan dan pemberhentian kepala Desa.

(2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur dan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati Batang Hari.

(3) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 1981 tentang Tata Cara Pengambilan Sumpah / Janji dan Pelantikan Kepala Desa (Lembaran Daerah Nomor 12 Tahun 1982 Seri D Nomor 7) dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 65

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Batang Hari.

Di Sahkan di Muara Bulian
pada tanggal 29 Mei 2000.
BUPATI BATANG HARI

M. SAMAN CHATIB.

Diundangkan di Muara Bulian.
pada tanggal 29 Mei 2000.
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATANG HARI

SYAFRUDDIN EFFENDI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BATANG HARI
TAHUN 2000 NOMOR.....8...

Pasal 10 cukup jelas.

Pasal 11 cukup jelas.

Pasal 12 cukup jelas.

Pasal 13 cukup jelas.

Pasal 14 cukup jelas.

Pasal 15 cukup jelas.

Pasal 16 cukup jelas.

Pasal 17 cukup jelas.

Pasal 18 cukup jelas.

Pasal 19 cukup jelas.

Pasal 20 cukup jelas.

Pasal 21 cukup jelas.

Pasal 22 cukup jelas.

Pasal 23 cukup jelas.

Pasal 24 cukup jelas

Pasal 25 cukup jelas.

Pasal 26 cukup jelas.

Pasal 27 cukup jelas.

Pasal 28 cukup jelas.

Pasal 29 cukup jelas.

Pasal 30 cukup jelas.

Pasal 31 cukup jelas.

Pasal 32 cukup jelas.

Pasal 33 cukup jelas.

Pasal 34 cukup jelas.

Pasal 35 cukup jelas.

Pasal 36 cukup jelas.

Pasal 37 cukup jelas.

Pasal 38 cukup jelas.

Pasal 39 cukup jelas.

Pasal 40 cukup jelas.

Pasal 41 cukup jelas.

Pasal 42 cukup jelas.

Pasal 43 cukup jelas.

Pasal 44 cukup jelas.

Pasal 45 cukup jelas.

Pasal 46 cukup jelas.

Pasal 47 cukup jelas.

Pasal 48 .....

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG HARI
NOMOR : 8 TAHUN 2000.

TANDA GAMBAR DAN TANDA PILIHAN PADA PEMILIHAN
KEPALA DESA :
DESA :
KECAMATAN :
KABUPATEN :

1	2	3	4	5
TANDA PILIHAN	TANDA PILIHAN	TANDA PILIHAN	TANDA PILIHAN	TANDA PILIHAN

DESA .....
PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA.....
KECAMATAN.....DESA.....

KETUA, **SEKRETARIS,**

BUPATI BATANG HARI

M. SAMAN CHATIB